

TESIS

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI

ANALYSIS OF INCOME INEQUALITY IN SULAWESI ISLAND

**SITTI NURMAWATI
A032181003**



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI

Disusun dan diajukan oleh

**SITTI NURMAWATI
A032181003**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI

Disusun dan diajukan oleh

SITTI NURMAWATI

A032181003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Pada tanggal 3 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Nursini, SE., MA.
NIP 19660717 199103 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hamrullah, SE., M.Si.
NIP 19681221 199512 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Pembangunan
dan Perencanaan



Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA.
NIP 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Nurmawati
NIM : A032181003
Program Studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

Analisis Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2022

Yang Menyatakan



Sitti Nurmawati

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi”. Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat, semoga di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayah Suardi dan Ibu Nurbiah dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis. Serta adikku Edi Hariyadi, Nur Atika Anggreni dan Ainun Humairah Zahratussita, terima kasih atas do'a, bantuan dan semangatnya selama ini.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA. selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Nursini, SE., MA. dan Dr. Hamrullah, SE., M.Si. selaku dosen Pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Agussalim, SE., M.Si., Dr. Sultan Suhab, SE., M.S. dan Dr. Abd. Rahman Razak, SE., M.S. selaku dosen penguji yang telah memberikan

saran terkait penyusunan tesis penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

6. Segenap dosen Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi selama menuntut ilmu.
7. Seluruh staf Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu proses administrasi penulis.
8. Teman-teman EPP dan ESD atas dukungan dan bantuannya kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis cantumkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan banyak pihak.

Makassar, Februari 2022

Sitti Nurmawati

ABSTRAK

SITTI NURMAWATI. *Analisis Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi*
(Dibimbing oleh Nursini dan Hamrullah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Data ini berupa data panel yang terdiri atas data seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi dari tahun 2011 sampai 2019. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta dan pengeluaran pemerintah daerah secara langsung berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi, sedangkan indeks pembangunan manusia secara langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi. Investasi swasta secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja di Pulau Sulawesi; pengeluaran pemerintah daerah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja di Pulau Sulawesi; dan indeks pembangunan manusia secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja di Pulau Sulawesi. Investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.

Kata Kunci: ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia.



ABSTRACT

SITTI NURMAWATI. *Analysis of Income Inequality in Sulawesi Island*
(Supervised by **Nursini** and **Hamrullah**).

This research aims to analyze the direct and indirect effects of private investment, local government expenditure and human development index on income inequality through employment opportunity and economic growth in Sulawesi Island.

The data used in this research were secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and the Capital Investment Coordinating Board. These data were in the form of panel data consisting of data from all provinces in Sulawesi Island from 2011 to 2019. The data analysis method used in this research was path analysis.

The results show that private investment and local government expenditure directly have a negative effect on income inequality in Sulawesi Island, while the human development index has a direct positive effect on income inequality in Sulawesi Island. Private investment does not indirectly affect income inequality through employment opportunity in Sulawesi Island, local government expenditure indirectly has a positive effect on income inequality through employment opportunity in Sulawesi Island, and human development index indirectly has a negative effect on income inequality through employment opportunity in Sulawesi Island. Private investment, local government expenditure and human development index indirectly have no effect on income inequality through economic growth in Sulawesi Island.

Keywords: *Income Inequality, Economic Growth, Employment Opportunity, Private Investment, Local Government Expenditure and Human Development Index.*



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Kajian Teori..... | 8 |
| 2.1.1 Teori Ketimpangan Pendapatan..... | 8 |
| 2.2 Hubungan Antar Variabel | 15 |
| 2.2.1 Hubungan Investasi Swasta dan Ketimpangan Pendapatan | 15 |
| 2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Ketimpangan Pendapatan | 15 |
| 2.2.3 Hubungan IPM dan Ketimpangan Pendapatan | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.4 Hubungan Investasi Swasta, Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan | 18 |
| 2.2.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah, Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan | 19 |
| 2.2.6 Hubungan IPM, Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan ... | 20 |
| 2.2.7 Hubungan Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan | 21 |
| 2.2.8 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan..... | 23 |
| 2.2.9 Hubungan IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan | 24 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu | 26 |
| BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS..... | 28 |
| 3.1 Kerangka Konseptual | 28 |
| 3.2 Hipotesis | 30 |
| BAB IV METODE PENELITIAN | 31 |
| 4.1 Rancangan Penelitian | 31 |
| 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 31 |
| 4.3 Jenis dan Sumber Data | 31 |
| 4.4 Metode Pengumpulan Data..... | 32 |
| 4.5 Metode Analisis | 32 |
| 4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional..... | 35 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| 5.1 Deskripsi Data..... | 37 |
| 5.1.1 Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sulawesi | 37 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 5.1.2 | Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sulawesi | 38 |
| 5.1.3 | Kesempatan Kerja Di Pulau Sulawesi | 39 |
| 5.1.4 | Investasi Swasta Di Pulau Sulawesi | 40 |
| 5.1.5 | Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Pulau Sulawesi | 41 |
| 5.1.6 | Indeks Pembangunan Manusia Di Pulau Sulawesi | 42 |
| 5.2 | Hasil Penelitian | 44 |
| 5.3 | Pembahasan | 49 |
| 5.3.1 | Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Ketimpangan Pendapatan..... | 49 |
| 5.3.2 | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan | 50 |
| 5.3.3 | Pengaruh IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan | 51 |
| 5.3.4 | Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Kesempatan Kerja | 51 |
| 5.3.5 | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Kesempatan Kerja | 53 |
| 5.3.6 | Pengaruh IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Kesempatan Kerja | 54 |
| 5.3.7 | Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi | 55 |
| 5.3.8 | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi | 56 |
| 5.3.9 | Pengaruh IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi | 57 |
| BAB VI | PENUTUP | 58 |
| 6.1 | Kesimpulan | 58 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 6.2 Saran | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 60 |
| LAMPIRAN | 65 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 26 |
| Tabel 5.1 Rasio Gini di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2019 | 37 |
| Tabel 5.2 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2019 | 38 |
| Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Bekerja di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2019 | 39 |
| Tabel 5.4 Investasi Swasta di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2019 | 41 |
| Tabel 5.5 Konsolidasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi dan Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2019 | 42 |
| Tabel 5.6 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2019 | 43 |
| Tabel 5.7 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung di Pulau Sulawesi | 44 |
| Tabel 5.8 Hasil Estimasi Pengaruh TidakLangsung di Pulau Sulawesi | 47 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Rata-rata Rasio Gini dan Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi | 2 |
| Gambar 1.2 Rata-rata Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Setiap Provinsi di Pulau Sulawesi dan Nasional Tahun 2011-2019..... | 3 |
| Gambar 2.1 Kurva Kuznets U Terbalik | 8 |
| Gambar 2.2 Kurva Lorenz | 13 |
| Gambar 3.1 Kerangka Konseptual | 29 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1. Konversi Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Dalam Rupiah | 65 |
| Lampiran 2. Investasi Swasta di Pulau Sulawesi | 67 |
| Lampiran 3. Realisasi Belanja Langsung Tingkat Provinsi | 69 |
| Lampiran 4. Realisasi Belanja Langsung Seluruh Kabupaten/Kota di Tiap Provinsi | 69 |
| Lampiran 5. Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja di Pulau Sulawesi | 70 |
| Lampiran 6. Data Regresi | 73 |
| Lampiran 7. Output Analisis Jalur Menggunakan Amos | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik (Sjafrizal, 2016). Distribusi pendapatan yang tidak merata akan memicu ketimpangan pendapatan.

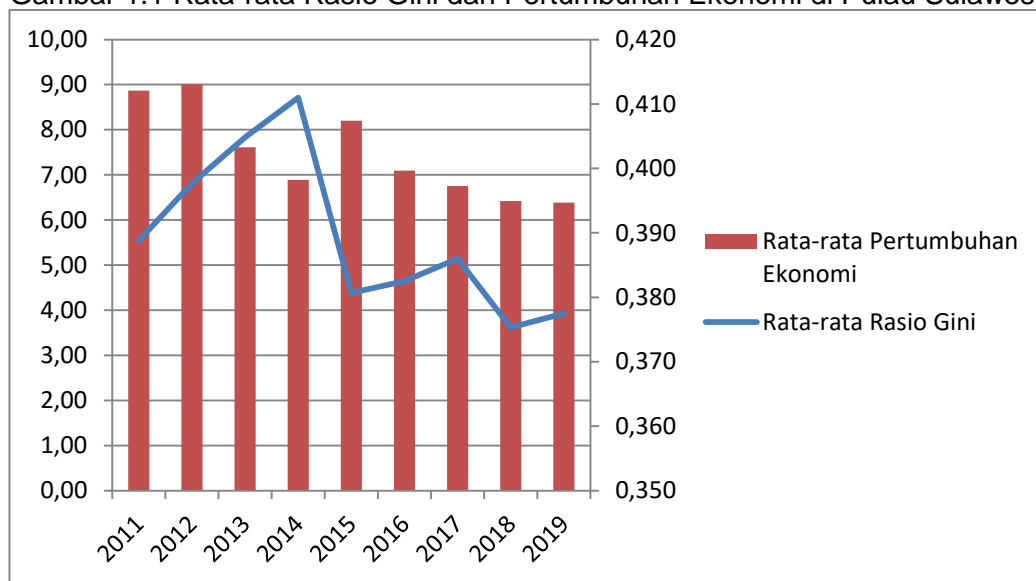
Ketimpangan yang tinggi menggambarkan pemusatan penguasaan aset dan mesin ekonomi pada kelompok tertentu, dan tentu saja memiliki efek merusak dalam jangka panjang, terutama dilihat dari aspek stabilitas sosial, politik dan keamanan. Penurunan ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Ukuran ketimpangan yang umum digunakan adalah koefisien gini.

Rata-rata rasio gini dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi berfluktuasi. Pada tahun 2011 sampai 2014 rata-rata rasio gini terus meningkat, menurun pada tahun 2015, kemudian kembali meningkat sampai tahun 2017, menurun pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019. Pada tahun 2012, rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat begitu juga dengan rata-rata rasio gini, sedangkan pada tahun 2018, rata-rata pertumbuhan ekonomi menurun begitu juga dengan rata-rata rasio gini.

Pertumbuhan ekonomi dan rasio gini yang sama-sama meningkat pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kelompok penduduk menengah ke atas lebih

banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan rasio gini yang sama-sama menurun pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kelompok penduduk menengah ke bawah lebih banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.1 Rata-rata Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi

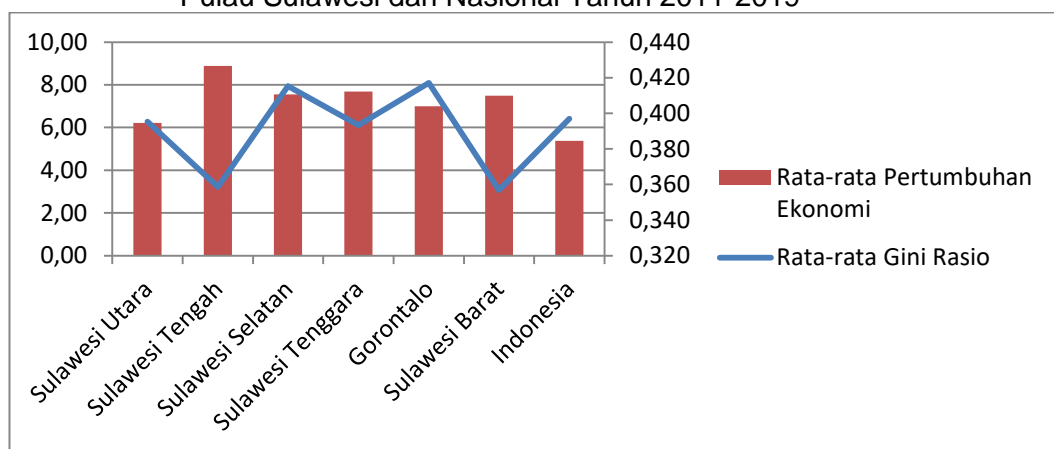


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Ketimpangan pendapatan di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi dalam Sembilan tahun terakhir masuk dalam 10 Provinsi di Indonesia dengan ketimpangan pendapatan yang paling tinggi. Pada tahun 2011, Provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan pertama, Provinsi Gorontalo berada di urutan ke lima, kemudian Provinsi Sulawesi Tenggara di urutan ke tujuh dan Provinsi Sulawesi Tengah di urutan ke Delapan dengan ketimpangan pendapatan yang paling tinggi. Pada tahun 2019, Provinsi Gorontalo berada di urutan ke dua, Provinsi Sulawesi Tenggara berada di urutan ke empat, kemudian Provinsi Sulawesi Selatan di urutan ke enam dan Provinsi Sulawesi Utara berada di urutan ke sembilan dengan ketimpangan pendapatan yang paling tinggi.

Kuznets (1955) mengatakan bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan kesenjangan pendapatan, namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.

Gambar 1.2 Rata-Rata Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Setiap Provinsi di Pulau Sulawesi dan Nasional Tahun 2011-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Secara umum, koefisien gini Provinsi yang ada di pulau Sulawesi pada tahun 2011-2019 berfluktuasi. Rata-rata koefisien gini Provinsi yang paling tinggi di Pulau Sulawesi yaitu Provinsi Gorontalo sebesar 0,417 dan Sulawesi Selatan sebesar 0,415. Rata-rata koefisien gini kedua Provinsi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata koefisien gini nasional, begitu pula dengan rata-rata pertumbuhan ekonominya.

Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Membuat lapangan pekerjaan yang lebih formal bagi pemula dan pekerjaan semi terampil bagi banyak pekerja di sektor kurang produktif dapat membantu mengatasi ketimpangan melalui pendapatan yang lebih tinggi (World Bank, 2016). Jumlah penduduk yang bekerja di Pulau Sulawesi pada tahun 2011-2019 berfluktuasi.

Kinerja ekonomi Indonesia tidak terlepas dari penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) (Kuncoro, 2010). Harrod-Domar dalam Subandi (2016) memberikan peranan kunci kepada investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh terhadap permintaan agregat, yaitu melalui penciptaan pendapatan dan terhadap penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Selama investasi neto tetap berlangsung pendapatan nyata dan output terus meningkat. Namun demikian untuk mempertahankan tingkat equilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh (*full employment*), maka baik pendapatan nyata maupun output keduanya harus meningkat pada laju pertumbuhan yang sama pada saat kapasitas produksi meningkat. Investasi mampu mengurangi ketimpangan pendapatan apabila investasi dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja dapat terserap dan memicu terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Investasi swasta di Pulau Sulawesi berfluktuasi dan persentase investasi masih rendah terhadap nasional. Rata-rata persentase investasi pulau Sulawesi terhadap nasional tahun 2011-2019 adalah sebesar 6,88 persen.

Pengeluaran pemerintah merupakan bentuk dari kebijakan fiskal oleh pemerintah dalam mengatur aktivitas perekonomian negara. Pengeluaran pemerintah terhadap penyediaan overhead sosial dan ekonomi menciptakan lebih banyak pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sodik (2007) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin), berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuannya sendiri. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah

juga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Sabir, *et al* (2015) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. pengeluaran pemerintah daerah yang berupa belanja langsung konsolidasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2011-2019 di Pulau Sulawesi cenderung meningkat.

Sumber daya manusia berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern, sumber daya manusia yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Pembangunan sumber daya manusia mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial pada umumnya. Ukuran kinerja pembangunan manusia adalah HDI (*Human Development Index*) atau Indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak (BPS, 2018).

Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari model pertumbuhan ekonomi Neoklasik Solow. Menurut Solow dalam Todaro (1998), pertumbuhan ekonomi bersumber dari tiga faktor, yaitu kenaikan dan kuantitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) dan teknologi. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia juga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Samsir dan Rahman (2018) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan. Semakin baik nilai IPM, tingkat kesenjangan pendapatan daerah pun semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai IPM, maka dapat mengakibatkan tingkat kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi. Rata-rata IPM Provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2011-2019 terus meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi ?
2. Apakah investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja di Pulau Sulawesi ?
3. Apakah investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi.

2. Menganalisis pengaruh investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja di Pulau Sulawesi.
3. Menganalisis pengaruh investasi swasta, pengeluaran pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Diharapkan menambah pengetahuan mengenai analisis ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang analisis ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi.
3. Diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal pengurangan ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

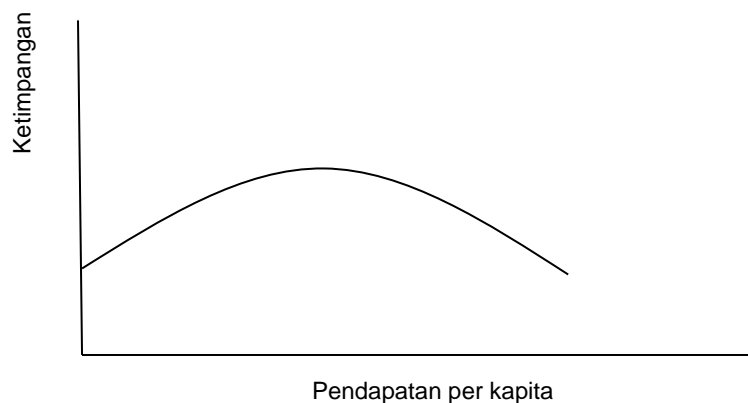
2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Machmud, 2016). Ketimpangan adalah konsep yang lebih luas daripada kemiskinan yang didefinisikan secara keseluruhan penduduk, bukan hanya sebagian penduduk di bawah garis kemiskinan tertentu (Haughton dan Khandker, 2009). Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh tingkat produktivitasnya.

Kuznets (1955) mengatakan bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time series*) dalam distribusi pendapatan.

Gambar 2.1 Kurva Kuznets U terbalik



Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern. Inti teori distribusi pendapatan Kuznets adalah dalam tahap awal pembangunan, tingkat kesenjangan pendapatan suatu masyarakat relatif senjang lalu tingkat kesenjangan ini terus meningkat sampai pada titik tertentu dan kemudian tingkat kesenjangan tersebut menurun. Dalam hal ini terjadi apa yang disebut *trade off* artinya jika pada tahap awal pembangunan terjadi pertumbuhan yang tinggi maka tingkat kesenjangan distribusi pendapatan juga tinggi, kemudian dalam proses selanjutnya kesenjangan pendapatan relatif stabil dan kemudian menurun karena adanya ketentuan-ketentuan legislatif dan keputusan-keputusan politik terhadap kelompok pendapatan tinggi.

Myrdal dalam Jhingan (2013) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effects*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effects*) cenderung mengecil. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini, menurut Myrdal adalah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar ketimpangan mempersempit ketimpangan regional.

Ketimpangan merupakan akibat dari heterogenitas etnis, yang berdampak secara langsung terhadap ketimpangan, karena etnis yang berbeda memiliki tingkat keterampilan yang berbeda, dan secara tidak

langsung melalui saluran politik. Ketimpangan berkorelasi dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser, 2005).

2.1.1.1 Ukuran Distribusi Pendapatan

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analitis dan kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan perseorangan atau distribusi ukuran pendapatan dan distribusi pendapatan “fungsional” atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi.

Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan itu tidak dipermasalahkan. Apa yang diperhatikan disini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja, atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun warisan. Selain itu, lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa) juga diabaikan.

Oleh karena itu, semua individu diurutkan hanya berdasarkan pendapatan yang diterimanya, dan membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran. Populasi dibagi menjadi lima kelompok (kuintil) atau sepuluh kelompok (desil) sesuai dengan tingkat pendapatan

mereka, kemudian menetapkan berapa proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok dari pendapatan nasional total.

Distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi (*functional or factor share distribution of income*) berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik). Walaupun individu-individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu bukan merupakan perhatian dari analisis pendekatan fungsional ini (Todaro dan Smith, 2006).

Dalam mengukur tingkat ketimpangan, ukuran yang digunakan berdasarkan ukuran *size distribution of income*, namun karena data pendapatan sulit diperoleh, maka digunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. terdapat empat ukuran yang merefleksikan ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu koefisien gini, ukuran Bank Dunia, indeks theil dan indeks L.

2.1.1.1.1 Koefisien Gini

Koefisien gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien gini untuk Negara-negara yang

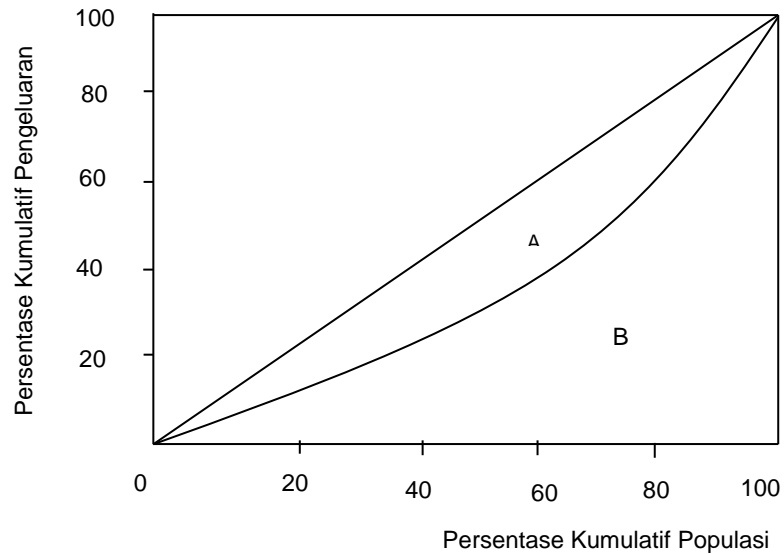
derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk Negara-negara yang derajat ketimpangannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35.

Pengukuran ketimpangan yang paling sederhana mengurutkan populasi dari yang termiskin hingga terkaya dan menunjukkan persentase pengeluaran (atau pendapatan) yang dapat dikaitkan dengan masing-masing kuintil atau desil dari populasi. Biasanya kuintil termiskin menyumbang 6-10 persen dari semua pengeluaran, kuintil teratas 35-50 persen.

Ukuran ketimpangan yang populer adalah koefisien gini, yang berkisar dari 0 (*perfect equality*) hingga 1 (ketimpangan sempurna), tetapi biasanya dalam kisaran 0,3 hingga 0,5 untuk pengeluaran per kapita. Koefisien gini diturunkan dari kurva Lorenz, yaitu kurva yang mengurutkan penduduk dari yang termiskin hingga terkaya, dan menunjukkan proporsi kumulatif dari populasi pada sumbu horizontal dan proporsi kumulatif pengeluaran (atau pendapatan) pada sumbu vertikal. Garis diagonal menunjukkan ketimpangan sempurna.

Koefisien gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$. jika $A = 0$, koefisien gini adalah 0, yang berarti merata sempurna, sedangkan jika $B = 0$, koefisien gini adalah 1, yang berarti timpang sempurna. Dalam contoh ini, koefisien gini sekitar 0,35. Beberapa pengguna, termasuk bank dunia, mengalikan angka ini dengan 100, dalam hal ini akan dilaporkan menjadi 35 (Haughton dan Khandker, 2009).

Gambar 2.2 Kurva Lorenz



$$\text{Gini} = 1 - \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1})(y_i + y_{i-1})$$

Jika ada N interval yang sama pada sumbu x , persamaan disederhanakan menjadi

$$\text{Gini} = 1 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i + y_{i-1})$$

2.1.1.1.2 Ukuran Bank Dunia

Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- 1) Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
- 2) Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.

- 3) Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

2.1.1.1.3 Generalized Entropy (Theil T dan Theil L)

Indeks Theil dan ukuran deviasi log rata-rata termasuk dalam pengukuran generalized entropy (GE). Rumus umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

Dimana \bar{y} adalah pendapatan rata-rata per orang (atau pengeluaran per kapita). Nilai ukuran GE bervariasi antara nol dan tak terhingga, nol menggambarkan distribusi merata dan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α mewakili bobot yang diberikan antara pendapatan pada perbedaan bagian distribusi pendapatan, dan bernilai riil. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan yang memengaruhi distribusi ekor bawah (penduduk miskin), dan nilai GE yang lebih tinggi lebih sensitif terhadap perubahan yang memengaruhi ekor atas (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0,1, dan 2. GE(1) merupakan indeks theil T yang dapat dituliskan sebagai

$$GE(1) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{\bar{y}} \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

GE(0) juga dikenal sebagai Theil L, dan terkadang disebut sebagai ukuran deviasi log rata-rata

$$GE(0) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{\bar{y}} \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right).$$

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Investasi Swasta dan Ketimpangan Pendapatan

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2013).

Adelman dan Morris dalam Arsyad (2004) mengemukakan bahwa salah satu penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Hartini (2017) bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Ketimpangan Pendapatan

Teori pengeluaran pemerintah memiliki dua jenis teori yaitu teori mikro pengeluaran pemerintah dan teori makro pengeluaran pemerintah. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Pada teori makro pengeluaran pemerintah ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti, model pembangunan tentang perkembangan pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan

Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pada tahap menengah peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan, namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas-aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2001, dalam Anugra *et al*, 2016).

Wagner mengemukakan sebuah teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, yaitu jika dalam suatu perekonomian pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2001, dalam Anugra *et al*, 2016).

Negara terbelakang ditandai oleh jurang perbedaan pendapatan dan kesejahteraan yang lebar. Pengeluaran Negara cenderung mempersempit jurang perbedaan tersebut. Pengeluaran dibidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan fasilitas medis membantu pembentukan modal manusia. Alhasil, daya beli rakyat yang bekerja dapat ditingkatkan. Begitu

pembangunan ekonomi berjalan cepat melalui pengeluaran negara, maka hambatan mobilitas ke atas tersingkir. Lapangan pekerjaan meluas dan menyebar, memberikan lebih banyak pekerjaan kepada rakyat dan dengan diperolehnya keterampilan maka tingkat upah cenderung meningkat. Dan lagi, industrialisasi cenderung meningkatkan peranan upah dan mengurangi peranan keuntungan di dalam pendapatan nasional dalam jangka panjang, dan mempersempit jurang perbedaan antara pendapatan rendah dan pendapatan tinggi (Jhingan, 2013).

2.2.3 Hubungan IPM dan Ketimpangan Pendapatan

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai sebuah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Secara prinsip, pilihan-pilihan penduduk yang dimaksud dapat tak terbatas dan bisa berubah-ubah seiring waktu. Meski demikian, pada semua level pembangunan, terdapat tiga hal yang esensial, yaitu hidup sehat dan berumur panjang, dapat memperoleh pendidikan, dan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Jika pilihan esensial ini tidak tersedia, maka banyak peluang lain yang tidak dapat terakses (UNDP, 1990).

Pengukuran pembangunan manusia pertamakali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai indeks pembangunan manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human development Report (HDR). Indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan

dimensi hidup layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli.

Salah satu cara untuk menurunkan ketimpangan adalah memperluas akses masyarakat terhadap program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Castello dan Domenech (2002), pendidikan memengaruhi tingkat kemampuan kerja, pengetahuan dan informasi yang memengaruhi produktivitas kerja seseorang dan pada akhirnya mempengaruhi perbedaan pendapatan. Selain pendidikan, kesehatan yang dimiliki seseorang dapat menjadi determinan ketimpangan. Meningkatnya pengeluaran akibat sakit, berkurangnya jumlah tenaga kerja serta buruknya kondisi pertumbuhan anak dari keluarga miskin secara umum mengurangi kesempatan seseorang untuk bekerja dan mengakses pendapatan yang layak (Smith, 1999).

Penelitian yang dilakukan oleh Alvan (2007) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan dan pembangunan manusia berkorelasi negatif dan kausalitas dua arah. Distribusi pendapatan lebih merata ketika pembangunan manusia meningkat. Di sisi lain, pembangunan manusia yang sedang dan rendah cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan.

2.2.4 Hubungan Investasi Swasta, Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan

Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan

pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2000).

Investasi mampu mengurangi ketimpangan pendapatan apabila investasi pada suatu daerah bertambah, hal ini karena investasi akan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya lapangan kerja tersebut, angkatan kerja dapat terserap dan memicu terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, dan diharapkan akan mendorong pengurangan tingkat ketimpangan pendapatan.

2.2.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah, Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan

Pengeluaran pemerintah merupakan bentuk dari kebijakan fiskal oleh pemerintah dalam mengatur aktivitas perekonomian negara. Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal harus ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran atau setengah pengangguran. Untuk itu pengeluaran pemerintah harus diarahkan kepada penyediaan overhead sosial dan ekonomi. Pengeluaran seperti itu menciptakan lebih banyak pekerjaan dan menaikkan efisiensi produktif perekonomian dalam jangka panjang (Jhingan, 2013). Kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan bertambah (Sukirno, 2013).

2.2.6 Hubungan IPM, Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan

Pembangunan manusia berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada.

Negara terbelakang dihadapkan pada dua macam problema tenaga kerja. Mereka kekurangan keterampilan kritis yang dibutuhkan bagi sektor industri dan mempunyai tenaga buruh surplus. Adanya buruh surplus dalam batas tertentu merupakan akibat langkanya keterampilan kritis. Karena kedua macam problema ini saling berkaitan satu sama lain. Pembentukan modal manusia bertujuan memecahkan problem-problem ini dengan menciptakan keterampilan yang diperlukan manusia sebagai suatu sumber produktif dan memberinya pekerjaan yang menguntungkan (Jhingan, 2013).

Menurut Goldin dan Katz dalam Mankiw (2016), peningkatan tajam dalam ketimpangan sebagian besar disebabkan oleh perlambatan pendidikan. Selama abad terakhir kemajuan teknologi telah menjadi kekuatan ekonomi yang stabil, tidak hanya meningkatkan standar hidup rata-rata tetapi juga meningkatkan permintaan akan pekerja terampil dibandingkan dengan pekerja tidak terampil. Pekerja terampil diperlukan untuk menerapkan dan mengelola teknologi baru, sementara pekerja yang kurang terampil cenderung menjadi usang. Dengan sendirinya, perubahan teknologi yang bias keterampilan ini cenderung menaikkan upah pekerja terampil relatif terhadap upah pekerja tidak terampil, sehingga meningkatkan ketimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Leibbrandth (2010), menemukan bahwa pasar tenaga kerja diidentifikasi sebagai pendorong utama ketimpangan dalam ras di Afrika Selatan, karena upah merupakan bagian penting dari penciptaan pendapatan, dengan desil teratas mengalami keuntungan upah riil dari waktu ke waktu dan desil yang lebih rendah mengalami kerugian.

2.2.7 Hubungan Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat menarik lebih banyak investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi (sjafrizal, 2014).

Teori Harrod-Domard memperhatikan fungsi dari pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat, penambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional. Pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas memproduksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercipta apabila pengeluaran masyarakat mengalami

kenaikan kalau dibandingkan dengan pada masa sebelumnya (Sukirno, 2011).

Hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan menurut Kuznets dalam Perkins *et al* (2013) yaitu ketimpangan meningkat pertamakali ketika suatu Negara melakukan transisi dari sebagian besar ekonomi pertanian ke ekonomi industri. Mekanisme yang mendasari kenaikan ketimpangan pendapatan ini adalah hasil dari perbedaan dalam pengembalian ke faktor-faktor produksi antara pertanian (di mana mereka lebih rendah dan kurang tersebar) dan industri. Ketika semua orang bekerja di pertanian, pendapatan didistribusikan secara relatif sama, tetapi seiring dengan kemajuan industrialisasi dan urbanisasi, ketimpangan meningkat. Semakin banyak faktor yang melakukan transisi dari pertanian ke pabrik, ketidaksetaraan mungkin akan mulai turun.

Lewis dalam Perkins *et al* (2013), mengembangkan model teoritis yang memprediksi peningkatan ketimpangan diikuti oleh "titik balik," yang akhirnya mengarah pada penurunan ketimpangan. Dengan menggunakan model dua sektor, sektor modern atau industri menghadapi "penawaran tak terbatas" tenaga kerja karena mampu menarik pekerja dengan produk marjinal rendah atau bahkan nol dari pertanian. Dengan upah yang ditekan oleh penawaran pekerja yang elastis, pertumbuhan industri disertai dengan peningkatan bagian laba. Ketika pendapatan rata-rata naik, tenaga kerja menerima bagian yang lebih kecil dari total pendapatan, meningkatkan ketidaksetaraan. Titik balik tercapai ketika semua tenaga kerja surplus telah diserap dan penawaran tenaga kerja menjadi lebih tidak elastis. Upah dan bagian pendapatan tenaga kerja kemudian mulai naik dan ketimpangan menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Adipuriyanti dan Sudibia (2015) menemukan bahwa investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

2.2.8 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2013). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2004) menemukan bahwa hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Artinya setiap ada penurunan kesenjangan pendapatan maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya setiap ada pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan kesenjangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabir, *et al* (2015) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah daerah

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.9 Hubungan IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Harbison dalam Jhingan (2013) pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif.

Menurut Solow dalam Todaro (1998), pertumbuhan ekonomi bersumber dari tiga faktor, yaitu kenaikan dan kuantitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) dan teknologi. Kemudian, Romer dalam Kuncoro (2010), mengemukakan teori pertumbuhan endogen (*New Growth Theory*) yang merupakan pengembangan dari teori pertumbuhan Neoklasik. Romer memasukkan variabel teknologi ke dalam model Solow, bukan sebagai variabel diluar model. Kemampuan pengembangan teknologi dan pengetahuan merupakan hal yang krusial dalam menciptakan pertumbuhan.

Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Sementara, keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada

kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro dan Smith, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Eicher dan Penalosa (2001) menunjukkan bahwa Pekerja terdidik dalam suatu perekonomian menentukan tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat pertumbuhan, parameter permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan penentu penting apakah ketimpangan meningkat atau menurun karena akumulasi modal manusia. Kekuatan pendorong model adalah fungsi produksi dimana produktivitas relatif tenaga kerja terampil menjadi tidak terampil berubah dengan laju perubahan teknis. Teknologi baru dihasilkan oleh pekerja terampil yang menyiratkan permintaan relatif tenaga kerja, dan keterampilan premium, penurunan keterampilan tidak monoton dalam perekonomian. Saat kita memasang fungsi permintaan dan penawaran tenaga kerja, kita temukan, pertama bahwa mungkin terdapat keseimbangan berganda, dan kedua bahwa ketika suatu Negara mengakumulasi keterampilan, ketimpangan mungkin meningkat, menurun atau mengikuti jalur berbentuk U. lintasan yang diikuti oleh Negara tertentu akan tergantung pada biaya langsung pendidikan, tingkat eksternalitas dalam proses pendidikan, dan elastisitas substitusi antara pekerja terampil dan tidak terampil dalam produksi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama (Tahun) | Variabel | Model | Lokasi | Hasil |
|----|---|--|---|----------------------------------|--|
| 1. | I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, dan Nyoman Yuliarmi (2014) | - Pertumbuhan ekonomi - Pengeluaran pemerintah - Investasi | Path Analysis | Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali | - Signifikan (+) - Signifikan (+) - Signifikan (+) |
| 2. | Sri Danawati, I K.G. Bendesa dan Made Suyana Utama (2016) | - Kesempatan kerja - Pertumbuhan ekonomi - Pengeluaran pemerintah - Investasi | Analisis Jalur | Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali | - Signifikan (+) - Signifikan (+) - Signifikan (+) - Signifikan (+) |
| 3. | Ranifial Anugrah, Taufiq Marwa dan Imelda (2016) | - Pengeluaran pemerintah | Granger Causality dan Kointegrasi | Provinsi Sumatera Selatan | - Signifikan (+) |
| 4. | Khairul Amri (2017) | - Pertumbuhan Ekonomi | - PVAR - Panel Granger Causality | 8 Provinsi di Sumatera | - Tidak Signifikan |
| 5. | Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksani (2017) | - IPM - Pertumbuhan Ekonomi - Tenaga Kerja - Jumlah Penduduk | Data Panel dengan Model Random Effect | Provinsi Jawa Timur | - Signifikan (+) - Tidak Signifikan (+) - Tidak Signifikan (+) - Tidak Signifikan (-) |
| 6. | Anggiat Mugabe Damanik, Zulgani dan Rosmeli (2018) | - Pertumbuhan Ekonomi - Jumlah Penduduk Bekerja - Investasi | Analisis Jalur | Provinsi Jambi | - Tidak Signifikan (-) - Signifikan (+) - Tidak Signifikan (+) |

| No | Nama (Tahun) | Variabel | Model | Lokasi | Hasil |
|----|---------------------|---|------------|------------|--|
| 7. | Fahmi Khomsa (2019) | <ul style="list-style-type: none"> - IPM - Pendapatan Per kapita - Desentralisasi Fiskal - Investasi - Upah Minimum - Ukuran Sektor Publik (Proksi Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB) | Data Panel | Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> - Signifikan (+) - Tidak Signifikan (+) - Tidak Signifikan (-) - Tidak Signifikan - Tidak Signifikan - Signifikan (+) |